

## BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi dengan sasaran meningkatnya capaian kinerja DPPPAP2KB.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyesunan perencanaan responsif gender dan anak dengan sasaran tersedianya data yang berkualitas dalam sistem data gender dan anak.
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
5. Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender
6. Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
7. Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD	Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD	Persentase penyerapan kegiatan dan anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Tingkat Kepuasan Pengguna layanan	70 %	75%	80%	85%	90%	95%	95 %	
3.	Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyesunan perencanaan responsif gender	Tersedianya data yang berkualitas dalam sitem data gender dan anak	sistem aplikasi data gender dan anak	0	1	1	1	1	1	1	

## Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	dan anak										
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak		4.22	4.08	3.94	3.80	3.70	3.66	3.66
			Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama		42.8 5	42.8 5	57.1 4	57.14	85.71	85.71	85.71
5.	Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	4.1	4.68	4.9	5.5	6	6.5	7	7
6.	Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	0.44	0.59	0.76	1.00	1.16	1.32	1.48	1.48

## Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	(unmet need)										
7.	Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan	Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	33.19	33.18	33.16	32.6	31.49	30.01	28.49	28.49

## **B. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur melalui Bintek, Workshop maupun Diklat dengan kebijakan mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kemampuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
2. Meningkatkan kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penyediaan sarana prasarana dan perbekalan perkantoran dengan kebijakan peningkatan kualitas dengan fokus pada manajemen kegiatan administrasi perkantoran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran;
3. Meningkatkan akurasi data gender dan anak, melalui pendataan data gender dan anak berdasarkan urusan, penyusunan sistem dan update data berkelanjutan dengan kebijakan pengembangan sistem data gender dan anak dengan fokus pada penyediaan sistem data gender di tingkat provinsi
4. Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak melalui peyediaan sarana dan prasana penunjang pencapaian hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas anak, pengembangan partisipasi anak sebagai perwujudan dari perlindungan anak dengan kebijakan mewujudkan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
5. Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah dalam berpartisipasi dan mewujudkan KKG melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan jumlah dunia usaha yang berpartisipasi dalam perwujudan KKG, dan peningkatan kapasitas SKPD dalam penyusunan PPRG, peningkatan jumlah kebijakan yang responsif gender dengan kebijakan Mewujudkan KKG dengan fokus pada pelibatan masyarakat, dunia usaha dan perangkat daerah, fasilitasi

- implementasi CSR bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan, dan penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
6. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KKB melalui Advokasi dan KIE, penguatan lini lapangan, penguatan kemitraan antar lembaga, penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK dengan kebijakan revitalisasi program KB dengan fokus pada Akses dan kualitas pelayanan KB, Kapasitas tenaga, dan Kelembagaan KB
  7. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR melalui peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta, peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi dengan kebijakan Peningkatan cakupan KB KR dan meningkatkan kualitas KB KR dengan fokus pada peningkatan KB Mandiri dan Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi.
  8. Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial dengan kebijakan penguatan dan perlindungan korban dengan fokus pada mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan, dan peningkatan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Matriks Penjabaran Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk**  
**dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD	Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur melalui BinteK, Workshop maupun Diklat dengan kebijakan mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kemampuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur melalui BinteK, Workshop maupun Diklat dengan kebijakan mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kemampuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Meningkatkan kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penyediaan sarana prasarana dan perbekalan perkantoran dengan kebijakan peningkatan kualitas dengan fokus pada manajemen kegiatan administrasi perkantoran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran;	Meningkatkan kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penyediaan sarana prasarana dan perbekalan perkantoran dengan kebijakan peningkatan kualitas dengan fokus pada manajemen kegiatan administrasi perkantoran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran;

<p>Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyesunan perencanaan responsif gender dan anak</p>	<p>Tersedianya data yang berkualitas dalam sitem data gender dan anak</p>	<p>Meningkatkan akurasi data gender dan anak, melalui pendataan data gender dan anak berdasarkan urusan, penyusunan sistem dan update data berkelanjutan dengan kebijakan pengembangan sistem data gender dan anak dengan fokus pada penyediaan sistem data gender di tingkat provinsi</p>	<p>Meningkatkan akurasi data gender dan anak, melalui pendataan data gender dan anak berdasarkan urusan, penyusunan sistem dan update data berkelanjutan dengan kebijakan pengembangan sistem data gender dan anak dengan fokus pada penyediaan sistem data gender di tingkat provinsi</p>
<p>Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak melalui peyediaan sarana dan prasana penunjang pencapaian hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas anak, pengembangan partisipasi anak sebagai perwujudan dari perlindungan anak dengan kebijakan mewujudkan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus;</p>	<p>Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak melalui peyediaan sarana dan prasana penunjang pencapaian hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas anak, pengembangan partisipasi anak sebagai perwujudan dari perlindungan anak dengan kebijakan mewujudkan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus;</p>



<p>Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender</p>	<p>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial</p>	<p>Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial</p>
<p>Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB</p>	<p>Meningkatnya peran masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah dalam berpartisipasi dan mewujudkan KKG melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan jumlah dunia usaha yang berpartisipasi dalam perwujudan KKG, dan peningkatan kapasitas SKPD dalam penyusunan PPRG, peningkatan jumlah kebijakan yang responsif gender dengan kebijakan Mewujudkan KKG dengan fokus pada pelibatan masyarakat, dunia usaha dan perangkat daerah, fasilitasi implementasi CSR bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan, dan penyusunan PPRG dan</p>	<p>Meningkatnya peran masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah dalam berpartisipasi dan mewujudkan KKG melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan jumlah dunia usaha yang berpartisipasi dalam perwujudan KKG, dan peningkatan kapasitas SKPD dalam penyusunan PPRG, peningkatan jumlah kebijakan yang responsif gender dengan kebijakan Mewujudkan KKG dengan fokus pada pelibatan masyarakat, dunia usaha dan perangkat daerah, fasilitasi implementasi CSR bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan, dan</p>

		pendampingan implementasi PPRG.	penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
		<p>Peningkatan akses dan kualitas KB-KR melalui peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta, peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi dengan kebijakan Peningkatan cakupan KB KR dan meningkatkan kualitas KB KR dengan fokus pada peningkatan KB Mandiri dan Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi.</p>	<p>Peningkatan akses dan kualitas KB-KR melalui peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta, peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi dengan kebijakan Peningkatan cakupan KB KR dan meningkatkan kualitas KB KR dengan fokus pada peningkatan KB Mandiri dan Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi.</p>

<p>Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan</p>	<p>Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan</p>	<p>Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial dengan kebijakan penguatan dan perlindungan korban dengan fokus pada mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan, dan peningkatan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan</p>	<p>Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial dengan kebijakan penguatan dan perlindungan korban dengan fokus pada mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan, dan peningkatan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan</p>
---	--	--	--